



Buletin Parlementaria



**3 Judi Online
Buat Hak
Anak
Terabaikan**



**4 Kenaikan PPN
Akibatkan Inflasi,
Upah Masyarakat
Stagnan**



Industri Pertahanan Kuat, Teguhkan Kemandirian Bangsa

Nomor 1322/III/XII/2024 Desember 2024



9 772614 339005



Industri Pertahanan Kuat, Teguhkan Kemandirian Bangsa



FOTO: PRIMA/AHA

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pindad.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengapresiasi kemampuan PT Pindad, perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan, dalam memproduksi berbagai sarana yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta sejumlah produk lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Hal ini disampaikan Nurdin Halid saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pindad, Kamis (21/11).

“Sebagai anak bangsa dan anggota DPR, saya merasa sangat bangga karena ternyata di Pindad

ini bisa memproduksi berbagai macam alat yang sangat penting bagi TNI, dan tidak hanya itu, Pindad juga memproduksi sarana umum seperti eskavator, traktor, bahkan becak dan mobil,” ujarnya kepada Parlementaria. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Pindad sebagai salah satu industri strategis dalam negeri.

Lebih lanjut, legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini menekankan pentingnya dukungan terhadap perkembangan industri Pindad. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus, terutama dalam hal penyiapan modal yang cukup.

“Sebagai wakil rakyat, kami ingin mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih dalam rangka menyediakan modal yang cukup agar industri di Pindad ini bisa lebih berkembang. Yang terpenting adalah Pindad dapat terus melayani berbagai kebutuhan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Komisi VI mendorong sektor industri dalam negeri agar semakin maju dan mampu memenuhi kebutuhan domestik serta memperkuat ketahanan nasional. Diharapkan dengan dukungan yang lebih besar, Pindad dapat memperluas kapasitas produksinya dan menjadi motor penggerak bagi industri pertahanan serta sektor lainnya di Indonesia. **pdt/aha**



Judi Online Buat Hak Anak Terabaikan



FOTO:ENO/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah melakukan berbagai intervensi dalam upaya pemberantasan judi *online* (judol) karena sudah semakin menyasar anak-anak. Puan khawatir judol bisa merusak masa depan generasi penerus Indonesia.

"Judi *online* kini semakin mengkhawatirkan di Indonesia, anak-anak semakin banyak yang terpapar karena mudahnya akses melalui internet. Ini mengancam masa depan generasi muda kita," kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (15/11).

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), anak terpapar judi *online* di Indonesia telah meningkat sampai 300%. Bahkan sepanjang tahun ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak terlibat judol.

Anak-anak yang terpapar judi *online* berada di rentang usia 11-19 tahun.

Tak hanya itu, PPATK juga melaporkan adanya sekitar 1.836 anak di bawah usia 17 tahun yang terlibat dalam judi *online* di Jakarta. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Total nilai transaksi yang melibatkan anak-anak ini mencapai sekitar Rp 2,29 miliar.

Puan menilai kondisi tersebut menuntut perhatian bersama dari para *stakeholder*, terutama bagi pemangku kebijakan. "Temuan ini merupakan sebuah kabar yang sangat mengkhawatirkan, apalagi menyangkut anak-anak. Saya berharap Pemerintah serius dalam menangani kasus Judol ini demi menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia," ujarnya.

aha



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Saveria Sa'diyah, S.I.Kom,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,
Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E,
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapny





FOTO: DOK/PTD

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Kenaikan PPN Akibatkan Inflasi, Upah Masyarakat Stagnan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Cucun mengingatkan bahwa kenaikan PPN yang berdampak positif terhadap penerimaan negara harus dibayar dengan inflasi yang tinggi di tahun 2022. Pada tahun tersebut, inflasi mencapai 5,51%.

Meski kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen bukan satu-satunya faktor penyumbang angka inflasi itu, namun kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Sebab peningkatan tarif meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kemudian dapat direspons dengan menaikkan harga jual produk mereka.

“Kenaikan harga produk dan jasa akan langsung memengaruhi indeks harga konsumen, salah satu indikator

inflasi. Tapi masalahnya, kenaikan inflasi tak diikuti dengan kenaikan upah yang signifikan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (19/11).

Kenaikan harga dan jasa disinyalir dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa potensi restitusi PPN akan meningkat seiring dengan kenaikan tarif PPN, yang pada gilirannya akan membutuhkan biaya administrasi lebih besar bagi Pemerintah.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat dampak yang bisa sangat signifikan terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian global yang tidak menentu seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kenaikan pajak ini. **uc/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi I dan Dubes Jepang Buka Peluang Kerja Sama OSA



FOTO: MUN/PDT

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima *courtesy call* atau kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia H.E. Masaki Yasushi yang digelar secara resmi di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Komisi I DPR RI menerima *courtesy call* atau kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia H.E. Masaki Yasushi yang digelar secara resmi di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Pada pertemuan itu, dibahas berbagai peluang kerjasama antara Indonesia-Jepang di bidang pertahanan.

Salah satunya, mengenai peluang adanya OSA (*Official Security Assistance*). "Mereka sendiri meminta bantuan Komisi I karena mereka sedang membuat OSA. Artinya mereka ingin membantu kita dan ini harus ada titik persetujuan dari Kemlu dan Kemhan," ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat diwawancarai **Parlementaria**.

Dan tentu, tandas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, juga diperlukan persetujuan dari

Komisi I DPR RI. "Tentu yang namanya kerjasama kan saling membantu apalagi ini sifatnya uluran tangan dari mereka. Jadi nanti Komisi I sudah

berkomitmen untuk membantu pembentukan OSA," tegas Utut.

Bahkan tak hanya OSA, namun juga hingga menyentuh nasib para pekerja migran Indonesia di Jepang yang memerlukan bantuan. "Dan Pak Dubes ini orang yang sangat saya lihat ringan tangan, dia juga terhadap laporan. Tadi ada Abraham (Abraham Srijaya/ Anggota Komisi I) yang dapilnya luar negeri juga mengatakan ada titik-titik yang pekerja migran Indonesia perlu bantuan disana. Dan dia juga *welcome*," ungkapnya.

Jadi, tegas Utut, pertemuan tersebut tidak hanya basa-basi politik atau *courtesy call* semata tapi ada hal yang konkret. "Kedepan Komisi I akan banyak menerima para Duta besar semata-mata untuk menjaga bahwa hubungan baik itu kan perlu saling atau resiprokal. Kita menerima dengan baik, mereka juga kalau kita berkunjung kita bisa ditemui oleh mereka," pungkas Utut. — **pun,mj/aha**



FOTO: MUN/PDT

Foto bersama usai *courtesy call* di ruang delegasi, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Scan QR untuk berita selengkapanya



Anggaran NPHD Tinggi, Legislator Dorong Efisiensi Penggunaan Dana di Pilkada Jawa Barat

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Anggaran NPHD yang dialokasikan untuk Pilkada tahun ini mencapai sekitar Rp 1,6 triliun, angka yang dinilai cukup tinggi dan memerlukan pengawasan ketat.

“Kita harus memastikan agar

penggunaan NPHD ini diawasi dengan baik. Jangan sampai, setelah pelaksanaan Pilkada, muncul masalah yang tidak diinginkan, seperti adanya ‘piring kotor’ yang merusak integritas proses Pilkada itu sendiri,” ujar Ujang Bey usai pertemuan dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11).

Ujang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran NPHD, mengingat situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Saya tekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu di Jawa Barat untuk memanfaatkan anggaran dengan bijak. Mengingat kondisi ekonomi yang kurang stabil, kita harus menjaga setiap rupiah yang dikeluarkan. Diharapkan Pilkada serentak pada 2024 ini dapat berjalan dengan sukses, transparan, dan bersih,” tegas politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pada 27 November 2024 mendatang, masyarakat Indonesia akan mengikuti Pilkada serentak pertama kali. Ujang berharap penyelenggaraan Pilkada ini dapat menjadi percontohan yang sukses dengan kualitas yang baik, sehingga memberikan pengalaman positif bagi demokrasi Indonesia ke depan. “Ini menjadi momentum penting, di mana masyarakat mengharapkan Pilkada serentak tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan proses yang transparan, adil, dan berkualitas,” tambahnya.

— rni/aha



FOTO: RSEI/PDT

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, saat mengikuti pertemuan dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Harus Perkuat Awasi Izin Tambang Ormas



FOTO: TS/PDT

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil saat menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan pandangannya terkait pemberian izin pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, meskipun DPR RI mendukung kebijakan tersebut, dirinya menekankan pentingnya pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat untuk menekan terjadinya pelanggaran.

Pernyataan ini disampaikan usai menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Ia pun memahami adanya sejumlah kekhawatiran yang muncul

terkait kebijakan ini, mulai dari adanya potensi kerusakan lingkungan, efek politik, dan pengelolaan tambang yang tidak optimal. Maka dari itu, ia sepakat transparansi dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas harus menjadi landasan implementasi dari kebijakan tersebut.

Menekankan kembali, Nasir menegaskan peran krusial lewat regulasi yang kuat agar pemerintah bersama DPR dan masyarakat bisa mengawasi secara efektif. "DPR memberikan persetujuan, tapi dengan sejumlah catatan. Pengawasan harus melibatkan kementerian terkait serta organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dan pertambangan," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PKS itu menilai peristiwa ini merupakan langkah awal yang berpotensi membuka peluang agar masyarakat bisa berkontribusi aktif di masa depan. Harapannya, adanya pemberian izin tambang kepada ormas, jika dikelola dengan positif yang diiringi dengan aturan yang ketat, potensi manfaat bisa dimaksimalkan.

ums/aha

“

DPR MEMBERIKAN PERSETUJUAN, TAPI DENGAN SEJUMLAH CATATAN. PENGAWASAN HARUS MELIBATKAN KEMENTERIAN TERKAIT SERTA ORGANISASI YANG BERGERAK DI BIDANG LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN

M. Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapny



Produksi Padi di Lampung Tengah Harus Ditingkatkan



FOTO: HNM/PTD

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lampung, Rabu, (13/11/2024).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan pihaknya mendukung penuh Lampung Tengah dalam mempertahankan status dan peningkatan produksi padi. Mengingat Lampung Tengah telah memberikan produksi padi terbesar di Provinsi Lampung sejak Tahun 2022 berdasarkan data SIScrop.

“Seperti yang kita ketahui, Lampung Tengah ini menjadi sentra penghasil beras terbesar untuk Provinsi Lampung. Karena itu, sesuai dengan Astacita Program Prioritas dari Bapak Prabowo untuk swasembada

pangan, Komisi IV DPR RI mendukung penuh Lampung Tengah untuk tetap menjaga dan meningkatkan produksi padi,” jelas Alex usai memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu, (13/11).

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemerintah pun telah menyiapkan kerangka kerja dalam mewujudkan swasembada pangan, yaitu dengan metode perluasan lahan panen, perbaikan infrastruktur serta penggunaan teknologi dan inovasi pertanian.

Melalui Kunspek kali ini, Politisi Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini mengungkapkan ingin melihat sejauhmana pelaksanaan program pompanisasi yang telah dijalankan Pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi, ternyata pompanisasi di sini memang berjalan sangat efektif. Meskipun baru dirasakan oleh 50 hektar dari total 148 hektar lahan irigasi yang tersedia, namun telah berhasil mencapai Intensitas Pertanaman (IP) 300 yang memungkinkan tiga kali panen dalam setahun. Yang sebelumnya hanya satu kali dalam setahun,” jelas Alex. **hnm/rdn**



Penanggulangan Pasca Kecelakaan Cipularang Km 92



FOTO:SSB/PDT

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama tim Komisi V saat meninjau langsung lokasi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Km 92, Kamis (13/11/2024).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin kunjungan kerja spesifik, Kamis (13/11) untuk meninjau langsung lokasi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Km 92 didampingi oleh para mitra kerja, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Korlantas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Binamarga), Jasamarga, serta stakeholder terkait lainnya. Mereka menyoroti kondisi jalan yang dinilai memerlukan perhatian serius.

“Ini jalan dengan tingkat kemiringan yang cukup tajam dan kondisi permukaan yang tidak sepenuhnya

mulus. Beban berat dari kendaraan seperti truk sangat berisiko di sini. Kami ingin mengidentifikasi titik lemah dari kilometer 100 hingga 92. Di sini kecelakaan sudah berulang kali terjadi, bahkan tahun ini saja sudah lima kali,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti pentingnya memastikan bahwa jalan tol memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Salah satu temuan yang ditekankan adalah bahwa kondisi jalan saat ini masih jauh dari standar tersebut. Ia juga menyinggung bahwa salah satu penyebab utama ketidakmampuan jalan dalam memenuhi SPM adalah beban berlebih dari truk yang

melampaui daya dukung jalan.

“Kita sedang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya adalah untuk memperkuat aturan terkait ODOL,” jelasnya. Lebih lanjut, Lasarus menegaskan pentingnya pengelolaan yang lebih ketat terhadap standar pelayanan minimum sebelum pengelola jalan tol diperbolehkan menaikkan tarif.

Langkah-Langkah selanjutnya upaya revisi undang-undang tersebut dinilai krusial dalam mengatur ulang kebijakan yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan. **ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bendungan Sidan Atasi Krisis Air di Bali

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Sidan untuk mengatasi krisis air di Bali. Dirinya berharap Bendungan Sidan, yang dijadwalkan selesai pada akhir bulan November 2024, bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Hal itu mengingat kondisi sejumlah daerah tengah mengalami kesulitan pasokan air.

“Dalam rapat tadi, kami juga mempertanyakan itu, kesiapan Bendungan Sidan apakah bisa beroperasi ‘on

schedule’, yang dijadwalkan pada 2024 pas sudah selesai. Tentu, manfaat yang kita harapkan, Bali kita pahami sekarang, kan lagi ada kesulitan air,” terang Senantara usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11).

Tambahnya, kebutuhan air di Bali semakin mendesak, lantaran memiliki ribuan properti komersial seperti hotel, vila, dan restoran yang bergantung pada pasokan air yang stabil. Selama ini, ungkapnya, banyak properti yang terpaksa menggunakan PDAM yang tidak stabil.

Sedangkan, jika menggunakan air

bawah tanah sulit lantaran perizinan penggunaan air bawah tanah tidak mudah diperoleh karena kini telah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Isu ini, menurutnya, menambah tantangan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasokan air di Bali.

“Kita berharap dengan adanya Bendungan Sidan ini, bisa mengatasi kebutuhan air untuk properti di Bali. Sekarang properti yang ada di Bali dipaksakan untuk menggunakan air PDAM, sementara PDAM sering tidak stabil. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada banyak masalah bagi properti-properti kita,” imbuhnya.

— **ums/rdn**



FOTO: SAM/PTD

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024).



Batik Lokal, Hadapi Tantangan Global



Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta pada Senin (11/11/2024).

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap industri batik dan UMKM agar mampu menghadapi persaingan global. Hal ini disampaikannya mengingat makin banyak produk tekstil asing serupa batik yang dijual melalui *platform* digital.

“Kita harus mendorong dengan segala upaya agar produk lokal kita dan industri-industri yang ada ini bisa memiliki daya saing yang dapat mengalahkan produk-produk dari luar. Jangan sampai Indonesia, yang jumlah penduduknya begitu besar, malah dijadikan orang sebagai pasar saja,” ujarnya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta pada Senin (11/11).

Saleh menegaskan bahwa produk lokal, termasuk batik, harus memiliki

daya saing yang kuat agar tidak kalah dari produk luar negeri. Menurutnya, industri kecil dan menengah (IKM) harus didorong untuk terus berkembang agar mampu bersaing di pasar internasional.

“Kita harus menjadikan orang Indonesia sebagai pelaku kreatif yang inovatif, dengan hasil produksi yang bisa diberdayakan di Indonesia dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Target kita ke depan adalah bagaimana agar produk-produk lokal, termasuk batik, bisa kita ekspor ke luar negeri,” tutur politisi dari Fraksi PAN ini dengan penuh semangat.

Dalam kunjungannya, Saleh optimistis bahwa dengan pengembangan yang tepat, kualitas batik Indonesia dapat bersaing dengan produk dari negara lain. Ia menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan standar kualitas untuk menjaga keaslian batik, serta memanfaatkan potensi pasar lokal dan global.

“Balai ini menjadi pusat pelatihan yang sangat membantu industri batik lokal, terutama dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk. Hal ini penting agar produk batik kita bisa lebih kompetitif,” ujar Saleh.

uc/aha



Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, melihat aktivitas membatik di Yogyakarta pada Senin (11/11/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Fakultas Kedokteran UIN Perhatikan Afirmasi Santri



FOTO: AHA/PDT

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang berencana membuka Fakultas Kedokteran. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam kunjungan kerja spesifik ke kampus tersebut, Rabu (13/11).

Marwan menyebutkan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel perlu mengakomodasi peserta didik dari pesantren atau santri melalui jalur afirmasi. Ia menilai, santri memiliki potensi besar namun sering kali terkendala dalam hal kompetisi akademik jika harus bersaing secara umum.

“Kalau disandingkan bersaing dalam ujian, mungkin saja mereka (santri) tidak berkemampuan. Tetapi kalau diberi kesempatan, mereka akan mampu,” ujar Marwan. Ia

menambahkan bahwa Fakultas Kedokteran yang berbasis nilai-nilai kepesantrenan akan memberikan warna baru dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia.

Lebih lanjut, Marwan mengusulkan agar santri mendapatkan jalur khusus

dalam penerimaan mahasiswa baru di fakultas tersebut. “Terserah saja, apa diberi kuota, apa diberi afirmasi. Kalau diberi kuota, berapa persen? Kalau afirmasi, setingkat apa pengetahuan mahasiswa itu yang bisa diafirmasi,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PKB ini berharap rencana ini dapat menjadi percontohan bagi UIN lain di Indonesia yang juga ingin mendirikan Fakultas Kedokteran berbasis pesantren. Dengan demikian, santri memiliki peluang lebih besar untuk mengenyam pendidikan kedokteran tanpa meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan yang telah menjadi ciri khas mereka.

Rencana pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga medis yang kompeten, tetapi juga menghasilkan dokter yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. **aha**



SANTRI MEMILIKI PELUANG LEBIH BESAR UNTUK MENGENYAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN TANPA MENINGGALKAN NILAI-NILAI KEPESANTRENAN YANG TELAH MENJADI CIRI KHAS MEREKA.

Marwan Dasopang

Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komitmen NTT Maksimalkan Penurunan *Stunting*

W Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memaksimalkan penanganan penurunan angka *stunting*. Sebab, menurutnya, keberpihakan Pemprov NTT terkait persoalan *stunting* ini masih kurang.

“Masih mengandalkan dana desa kan gak boleh begitu karena dana desa itu beda skema dan peruntukannya bukan hanya untuk *stunting*,” ungkapnya usai pertemuan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kamis (14/11).

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat IV ini pun berharap agar Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana yang besar untuk persoalan *stunting* ini.

“Harus dipastikan bahwa di APBD Provinsinya itu memang ada alokasi yang cukup besar untuk *stunting*, karena persoalan *stunting* masih menjadi isu nasional sampai hari ini,” katanya.

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan jika Nusa Tenggara Timur mau keluar dari sepuluh besar zona *stunting* yang tinggi maka regulasinya harus berpihak untuk persoalan *stunting*.

“Kalau memang NTT mau keluar

dari zona sepuluh besar provinsi yang *stunting* nya tinggi ya harus ditunjukkan bahwa dia punya keberpihakan melalui regulasi melalui anggaran untuk persoalan *stunting*,” tegasnya

Pemprov NTT juga harus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota agar mempunyai visi yang sama menurunkan *Stunting*, sehingga isu *stunting* di Nusa Tenggara Timur dapat menurun.

“Pemda Provinsi harus berkoordinasi oleh kabupaten kota melalui visi yang sama untuk menurunkan *stunting* jika sudah sama baru minta ke pusat untuk menambah anggaran untuk menurunkan *stunting*,” tutupnya.

— azk/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin saat mengikuti pertemuan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kamis (14/11/2024).

FOTO: AZK/PDT

Usulan Fasilitas *Recovery* Bagi Para Atlet Cedera



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur saat mengikuti Rapat Kerja dengan Ketua Komite Olahraga Nasional, Ketua Komite Olimpiade Indonesia dan Ketua Komite Olahraga Masyarakat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki fasilitas pusat pemulihan (*recovery center*) untuk menangani atlet yang mengalami cedera saat menjalani kompetisi. Menurutnya fasilitas pusat pemulihan akan sangat berguna bagi atlet yang sering kali dilanda cedera.

“Usulan yang disampaikan Ketua KOI mengenai fasilitas *recovery* harus kita dukung, fakta dilapangan memang saat ini kita belum punya fasilitas tersebut,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komite Olahraga Nasional, Ketua Komite Olimpiade Indonesia dan Ketua Komite Olahraga Masyarakat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

Ia mengatakan, dalam upaya percepatan pemulihan cedera atlet, sangat diperlukan fasilitas *recovery center* berbasis *sport science*, lengkap dan terpadu, yang saat ini belum ada di Tanah Air.

“Kita hanya fokus mencari bibit-bibit atlet olahraga namun kita mengabaikan dampak cedera yang pastinya akan dialami oleh seluruh atlet,” ungkap Politisi PDI-P ini.

Lebih lanjut, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KOI) Raja Sapta

Oktohari mengatakan, dirinya sudah minta langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Berdasarkan informasi yang disampaikan Menpora, kata dia, fasilitas tersebut akan diadakan di Cibubur, Jakarta Timur.

“Untuk fasilitas ini tentu harus didukung peralatan dan sumber daya manusia yang sangat profesional agar bisa mencegah dan mengatasi cedera atlet,” pungkasnya.

tn/rnm



KITA HANYA FOKUS Mencari BIBIT-BIBIT ATLET OLAHRAGA NAMUN KITA MENGABAIKAN DAMPAK CEDERA YANG PASTINYA AKAN DIALAMI OLEH SELURUH ATLET

Denny Cagur

Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Revisi UU Hak Cipta Akomodasi Perkembangan Zaman



Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw saat mengikuti FGD terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi di Gedung Nusantara.

Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi. Diskusi dengan tajuk 'Perlindungan Hukum Karya Cipta Dalam Tata Kelola Digitalisasi' ini dihadiri oleh para pakar hukum, musisi, penulis lagu dan insan kreatif di belantika musik tanah air.

"Karena aku kan melakukan usulan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk revisinya, jadi hari ini kita adakan FGD khusus untuk musisi. Nanti mungkin nanti ada FGD-FGD

berikutnya yang untuk penulis buku, untuk sinematografi dan lain-lain karena Undang-Undang Hak Cipta ini bukan hanya milik musisi aja tapi banyak banyak yang memilikinya," tutur Politisi Partai Gerindra ini usai diskusi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Melly menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan digital yang sangat cepat, termasuk di bidang hak cipta. Melalui FGD ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara hak cipta dan kebebasan berkreasikan dalam dunia digital.

"Karena di UU yang tahun 2014 itu undang-undang yang nomor 28, tidak mengakomodir semuanya khususnya dengan perkembangan di era digitalisasi ini. Jadi memang harus ada adaptasi-adaptasi dan perubahan-perubahan yang lebih baik dan aku juga harus banyak mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak," ujarnya.

Rancangan undang-undang atas perubahan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diajukan oleh Badan Legislasi untuk masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan prioritas 2025.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sambut Baik Langkah Batasi Anggaran Perjalanan Dinas



FOTO: CTK/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi anggaran perjalanan dinas pada kementerian dan lembaga. Apabila kebijakan itu berjalan dengan efektif dan efisien, penghematan yang dilakukan negara akan sangat besar.

"Nah efektif efisien itu dalam arti jangan terlalu sering-sering berangkat kunjungan keluarnya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Menurut saya yang paling penting itu efektivitasnya sebuah perjalanan itu misalnya dari total kemarin misalnya 100% sekarang turun 50% ya kami bisa menerima itu," kata Fauzi kepada tim **Parlementaria** di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11)

Dengan penghematan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan anggaran itu untuk kebutuhan lainnya, terutama yang sesuai dengan visi presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah makan bergizi Rp71 triliun, pembangunan sekolah Rp20 triliun, serta pengobatan gratis sekita Rp5-6 triliun.

"Terus satu lagi membangun ketahanan pangan di tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi itu pelaksanaannya kurang lebih tetap hampir Rp112 - Rp115 triliun," jelasnya

Ia berharap, kebijakan ini tidak hanya berlaku di pusat, melainkan seluruh komponen elemen bangsa. "Tidak hanya di pusat. di provinsi, di kabupaten/kota juga melakukan penghematan anggaran khusus perjalanan dinas," tutupnya. **hal/rdn**



PEMERINTAH BISA MEMANFAATKAN ANGGARAN ITU UNTUK KEBUTUHAN LAINNYA, TERUTAMA YANG SESUAI DENGAN VISI PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO.

Fauzi H. Amro

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Minimnya Peran OJK dalam Pemberantasan Judi *Online*



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio saat mengikuti RDP Komisi XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judi *online*. Menurutnya, OJK seharusnya bisa lebih banyak berperan dalam pemberantasan aktivitas ini, yang dinilai selama ini OJK terlalu banyak diam terkait pemberantasan judi *online*. Mengingat, dalam beberapa pekan terakhir mulai muncul banyak oknum pemerintah yang justru terlibat dalam judi *online*.

“Jangan-jangan banyak warga

OJK yang terlibat (main di judi *online*) seperti di Kominfo. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judi *online*, tapi ini saya gak nuduh,” ujar Primus dalam RDP Komisi

XI dengan OJK terkait Kinerja OJK Triwulan III-2024, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN meminta keseriusan OJK dalam memberantas judi *online*. Ia melihat selama ini pemberantasan ini hanya berfokus pada situs-situs saja.

Primus menambahkan bahwa OJK perlu melihat lebih lanjut terkait rekening-rekening judi *online* ini. Mengingat, transaksinya judi ini selalu lewat rekening di perbankan juga. “Padahal bisa jadi yang terlibat adalah Himbara kita, jadi hanya karena berorientasi profit, semua dibenarkan,” ujar Primus.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Mahesa mempertanyakan bagaimana perbankan selama ini melakukan mitigasi risiko terkait aktivitas judi *online*. Meskipun, saat ini sudah ada juga pemblokiran rekening hingga 8.000 rekening.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan bahwa perbankan agar memperketat ketika calon nasabah mau membuka rekening di bank. Di mana, itu bisa dilihat dari historis dan *background checking* tiap calon nasabah. **we/rdn**



OJK PERLU MELIHAT LEBIH LANJUT TERKAIT REKENING-REKENING JUDI *ONLINE* INI. MENINGGAT, TRANSAKSINYA JUDI INI SELALU LEWAT REKENING DI PERBANKAN

Primus Yustisio

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau *Smelter* Freeport Indonesia Pasca Kebakaran

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, memimpin kunjungan spesifik ke fasilitas *Smelter* PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan memantau perkembangan pembangunan *smelter* sekaligus mengevaluasi dampak kebakaran yang terjadi pada Oktober lalu terhadap progres proyek strategis tersebut.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana progres pembangunan *smelter* ini, sekaligus melakukan pengecekan dan klarifikasi atas insiden kebakaran yang sempat

menghentikan proses pengerjaan proyek,” ujar Bambang usai kunjungan.

Smelter PTFI di Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung program hilirisasi tembaga di Indonesia. Saat ini, PTFI mampu mengolah hingga 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun, dengan rencana peningkatan kapasitas menjadi 1,3 juta ton per tahun. Kapasitas *smelter* di Gresik sendiri dirancang mencapai 1,7 juta ton konsentrat per tahun, atau sekitar 60% dari total kapasitas konsentrat Freeport.

Bambang menegaskan bahwa beroperasinya *smelter* ini akan menjadi tonggak penting dalam mengakhiri ekspor konsentrat tembaga secara

penyempurnaan. “Freeport kini 100% tidak lagi mengekspor konsentrat. Semua diproses di dalam negeri. Kami juga mencatat bahwa keberadaan *smelter* ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui *circular economy*,” jelasnya.

Selain itu, Bambang juga mengapresiasi munculnya investasi lanjutan di sekitar fasilitas *smelter*, termasuk dari perusahaan asal Tiongkok yang akan memproses katoda hasil produksi PTFI. “Ini perkembangan yang baik dan menunjukkan potensi investasi lanjutan di sekitar kawasan industri *smelter*,” tambah legislator dari Fraksi P-Golkar tersebut.

— mun/aha



FOTO: MUN/PDT

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, bersama tim saat kunjungan spesifik ke fasilitas *Smelter* PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pertamina Hulu Mahakam Tingkatkan *Lifting* Meski Fasilitas Tua



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat bertukar cenderamata dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

Blok Mahakam, yang telah beroperasi sejak 1966, kini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam setelah sebelumnya berada di bawah Total E&P Indonesia. Meski sumur dan fasilitas produksinya sudah berumur, Pertamina Hulu Mahakam terus berupaya mencapai target *lifting* minyak. Optimisme ini mendapat dukungan dari Komisi XII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Kita percaya karena sekarang dikelola oleh Pertamina Hulu, sehingga hingga hari ini mereka mampu mempertahankan kinerja dengan baik. Sebagaimana ditekankan oleh Presiden, kita terus mengupayakan kemandirian energi, dengan target

produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 dan sekitar 12 BCF per hari untuk gas,” ujar Wakil Ketua Komisi

XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Jumat (15/11).

Sugeng menyoroti pentingnya perawatan fasilitas yang sudah tua agar tidak menghambat pencapaian target produksi. Ia mendorong PT Pertamina Hulu Mahakam untuk memasukkan solusi terkait dalam dokumen *Budget Plan of Development* (BOD).

“Beberapa anjungan dan fasilitas produksi memang sudah mengalami korosi. Kita harapkan BOD memuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, termasuk perawatan dan penggantian fasilitas yang diperlukan,” tambah Sugeng.

Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pertamina Hulu Mahakam untuk menyiasati penurunan produksi akibat usia sumur. Salah satunya adalah intervensi sumur lama dan pengeboran sumur baru.

— syn/aha



BEBERAPA ANJUNGAN DAN FASILITAS PRODUKSI MEMANG SUDAH MENGALAMI KOROSI. KITA HARAPKAN BOD MEMUAT LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGATASI MASALAH INI, TERMASUK PERAWATAN DAN PENGGANTIAN FASILITAS

Sugeng Suparwoto

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Desak Penyelesaian Perpres untuk Kelancaran Tugas BNPT



FOTO: OIV/PDT

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, saat memimpin Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mendesak Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengajukan dan memfasilitasi revisi atau penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres), termasuk Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

“Saya ingin mengingatkan bahwa mitra kerja kami, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), berada di bawah lingkup Perpres No. 7 Tahun 2021, yang akan berakhir pada Desember 2024. Oleh karena itu, saya berharap Pak Menteri, sebagai orang

terdekat dengan Presiden, dapat segera menyelesaikan revisi Perpres ini agar BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya,” kata Rinto dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Selain Perpres No. 7 Tahun 2021,

Komisi XIII DPR RI juga mendesak penyelesaian Keputusan Kemenko Polhukam No. 11 Tahun 2024, yang akan berakhir pada Desember 2024. Komisi XIII juga mendukung penyelesaian proses integrasi Sekretariat Kabinet sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 139 Tahun 2024. **gal/aha**



PAK MENTERI, SEBAGAI ORANG TERDEKAT DENGAN PRESIDEN, DAPAT SEGERA MENYELESAIKAN REVISI PERPRES INI AGAR BNPT DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK SESUAI DENGAN TUPOKSINYA,

Rinto Subekti

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



BKSAP Sampaikan Langkah-Langkah Adaptasi Iklim di COP29

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan *Parliamentary COP29* di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap

perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik.

Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim secara berkelanjutan.

Kedua, parlemen harus memastikan pengambilan keputusan

yang transparan dan inklusif. Terkait inklusivitas, ia menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam parlemen. Ketiga, ia mendorong parlemen global untuk terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan iklim ini.

Di sisi lain, politisi dari Partai Gerindra ini menyoroti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang dalam penanganan karbon, mengingat negara-negara maju adalah kontributor terbesar terhadap krisis iklim. Ia mengingatkan bahwa negara-negara maju melakukan eksploitasi terhadap negara-negara berkembang selama era Revolusi Industri, yang menyebabkan peningkatan emisi karbon secara signifikan.

Saraswati juga mengingatkan bahwa negara-negara miskin dan berkembang berhak mendapatkan akses untuk bantuan keuangan guna mendukung adaptasi iklim. Ia juga melihat peran penting sektor dunia usaha dan bisnis dalam mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. — aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati, saat mengikuti rangkaian acara *Parliamentary COP29* di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024).

FOTO: IST/PDT

Bertemu Dubes Ukraina, Pimpinan BKSAP Bahas Isu Perdamaian



FOTO: DEP/PT

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga, menyelenggarakan pertemuan kehormatan (*courtesy call*) dengan Duta Besar Ukraina Vasyi Hamianin, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga, menyelenggarakan *courtesy call* dengan Duta Besar Ukraina Vasyi Hamianin, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). Dalam pertemuan tersebut, isu perdamaian menjadi topik pembicaraan antarkedua negara.

Ditemui Parlementaria usai pertemuan mengatakan, Bramantyo menjelaskan Pimpinan BKSAP dan

Vasyi Hamianin bertemu untuk saling mengenal satu sama lain dan



KITA SALING MENGENAL SEKALIGUS JUGA MENJELASKAN BAHWA BKSAP JUGA ADALAH MEMILIKI KEPENGURUSAN YANG BARU DENGAN ANGGOTA-ANGGOTANYA, DAN BANYAK TADI DISAMPAIKAN OLEH DUTA BESAR DARI UKRAINA BAHWA INGIN MEMBUKA KOMUNIKASI YANG LANCAR DAN JUGA KOMUNIKASI YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN JUGA PARLEMEN INDONESIA

Mardani Ali Sera

Ketua BKSAP DPR RI

membuka komunikasi yang baik dengan Parlemen Indonesia. Sebab, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keanggotaan BKSAP yang baru.

“Kita saling mengenal sekaligus juga menjelaskan bahwa BKSAP juga adalah memiliki kepengurusan yang baru dengan dengan anggota-anggotanya, dan banyak tadi disampaikan oleh Duta Besar dari Ukraina bahwa ingin membuka komunikasi yang lancar dan juga komunikasi yang baik dengan pemerintah Indonesia dan juga Parlemen Indonesia,” katanya.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi tetangga yang baik bagi siapapun. Yakni dengan menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai negara dalam rangka untuk menjaga perdamaian.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam tersebut, Ukraina menyinggung tak hanya isu perdagangan, edukasi, maupun pertukaran budaya, tetapi juga isu perdamaian, dan menjelaskan posisi dan perkembangan Ukraina saat ini. Ukraina pun berharap komunikasi dan kerja sama dengan DPR RI dapat terus diperkuat.

“Tentunya kami menyambut hal itu dengan baik seperti apa yang menjadi tanggung jawab konstitusi kita dalam menjaga perdamaian, kami menangkap itu dengan sinyal dengan baik,” ujarnya. **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



BIB Lembang Wujudkan Swasembada Pangan

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendukung Swasembada Pangan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, BAKN DPR RI akan mengawal hal tersebut melalui penguatan dan pengawasan manajemen keuangan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. Hal ini mengingat BIB Lembang memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Balai Inseminasi Buatan selain menghasilkan PNPB juga ini akan menjadi faktor pendukung faktor penopang terhadap swasembada daging sapi,” katanya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (15/11).

Ia pun melanjutkan, saat ini Indonesia masih melakukan impor daging sapi sebanyak 400 ribu ton. Menurutnya, jika Indonesia mampu meningkatkan ketersediaan semen atau sperma sapi untuk



FOTO: INDY/PDT

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).

pengembangbiakkan sapi di seluruh Indonesia dengan jumlah indukan yang mencukupi maka, pastinya hal itu dapat mengimbangi kebutuhan impor.

Menurutnya, tiga aspek penting yang dapat mewujudkan dan mengawal negeri menjadi lebih baik lagi. *Pertama*, terkait aspek

kewaspadaan terhadap status-status penyalahgunaan kewenangan keuangan negara; *kedua*, peningkatan penerimaan PNPB; *ketiga* adalah tata kelola.

“Tadi isu-isu strategis dan pengawalan terhadap kasus-kasus penyelewengan keuangan negara itu adalah juga bagian dari tugas kami di BAKN. Mudah-mudahan saya kira ini bisa bagi BAKN mampu berkontribusi besar untuk mengawal negeri ini menjadi lebih baik,” katanya.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa BIB Lembang sebetulnya sudah tidak layak untuk mengembangkan produktivitas yang ada, mengingat lokasi sekitar BIB sudah bukan lagi lahan terbuka, melainkan hotel, kantor dan lain sebagainya. Padahal, seharusnya Pemerintah dapat mengembangkan wilayah ini ke lokasi lain guna peningkatan dan pengembangan di bidang peternakan.

ndy/rdn

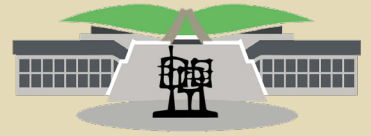


ISU-ISU STRATEGIS DAN PENGAWALAN TERHADAP KASUS-KASUS PENYELEWENGAN KEUANGAN NEGARA ITU ADALAH JUGA BAGIAN DARI TUGAS KAMI DI BAKN.

Herman Khaeron
Wakil Ketua BAKN DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Ketua Komisi IV DPR RI,
Siti Hediati Soeharto,
beserta tim saat meninjau
program pompanisasi di
Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, Rabu
(13/11/2024).**

FOTO:PUN/PDT



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

